PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Purbaya Yudhi Sadewa
   Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim
   Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Luhut B. Pandjaitan
   Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI
   Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Januari 2019

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Luhut B. Pandjaitan	**Purbaya Yudhi Sadewa**

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KEDAULATAN MARITIM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUNAN
Customer Perspective				
SS.1	Terwujudnya Kedaulatan Indonesia Sebagai Negara Maritim yang Berperan Aktif di Tingkat Regional Global	1	Persentase Inisiasi Gagasan Indonesia yang diterima di Level Internasional	80 %
		2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim yang Menjadi dasar Penerbitan Kebijakan Menteri Koordinator	75%
		3	Persentase Hasil Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan Kedaulatan Maritim	55 %
Internal Business Process Perspective				
SS.2	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim	4.	Jumlah Rancangan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Kedaulatan Maritim yang dihasilkan	13
SS.3	Terselesaikannya Tugas Tambahan Lainnya di Bidang Kedaulatan Maritim yang diberikan Pimpinan	5.	Persentase penyelesaian tugas lainnya	100%
Learning And Growth Perspective				
SS.4	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik	6.	Nilai Evaluasi Intenal (AKIP)	≥65
		7.	Persentase Nilai Ketaatan Penyampaian Pelaporan	100%
SS.5	Terkelolaanya Anggaran secara optimal	8.	Persentase Realisasi Anggaran	≥85

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim	Rp 3.168.274.000,-
2	Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim	Rp 3.550.908.000,-
3	Koordinasi Delimitasi Zona Maritim	Rp 3.052.852.000,-
4	Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim	Rp 3.127.663.000,-
5	Pelayanan Sesdep Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	Rp 9.739.536.000,-
	JUMLAH ANGGARAN	**Rp 22.639.233.000,-**

Jakarta, 18 Januari 2019

Menteri Koordinator Bidang
Kemaritman RI,

Luhut B. Pandjaitan

Deputi Bidang Koordinasi
Kedaulatan Maritim,

Purbaya Yudhi Sadewa

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	JUDUL KINERJA/OUTPUT KINERJA	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
			I	II	III	IV
1.	Persentase Inisiasi Gagasan Indonesia yang diterima di Level Internasional	Inisiasi Gagasan Indonesia yang diterima di Level Internasional				x
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim yang Menjadi dasar Penerbitan Kebijakan Menteri Koordinator	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim yang Menjadi dasar Penerbitan Kebijakan Menteri Koordinator				x
3	Tersedianya Bahan Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim yang Efektif	1. Rumusan Kebijakan Penyusunan RAN Perpres No.16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan				x
		2. Rumusan Kebijakan Realignment Flight Information Region (FIR)		x		
		3. Rumusan Kebijakan Peraturan Perundang-undangan yang merujuk pada UNCLOS				x
4	Tersedianya Bahan Rekomendasi Kebijakan Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim yang Efektif	1. Rumusan Kebijakan Melawan Illegal Fishing dan Pembentukan Norma Hukum				x
		2. Rumusan Pengendalian Praktek Penangkapan Ikan Secara Destruktif			x	
		3. Rumusan Pengendalian Pelaksanaan Archipelagic Island States (AIS)				x
5	Tersedianya Bahan Rekomendasi Kebijakan Bidang Delimitasi Zona Maritim yang Efektif	1. Rumusan Kebijakan Validasi, Verifikasi, dan Pendaftaran Penamaan Rupabumi			x	
		2. Rumusan Kebijakan Nasional Mengenai Perundingan Batas Maritim				x
		3. Rumusan Kebijakan Penguatan Posisi Perundingan RI dengan Negara Tetangga tentang Batas Landas Kontinen				x
6	Tersedianya Bahan Rekomendasi Kebijakan Bidang	1. Rumusan Pengendalian Proses Hukum MV Caledonian Sky			x	

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	JUDUL KINERJA/OUTPUT KINERJA	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
			I	II	III	IV
	Navigasi dan Keselamatan Maritim yang Efektif	2. Rumusan Kebijakan Regulasi Kabel Laut				x
		3. Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian VTS				x
		4. Rumusan Pengendalian Penetapan PSSA Selat Lombok dan Selat Sunda			x	
7	Terselesaikannya Tugas Tambahan Lainnya di Bidang Kedaulatan Maritim yang diberikan Pimpinan	Terselesaikannya Tugas Tambahan Lainnya di Bidang Kedaulatan Maritim yang diberikan Pimpinan				x
8	Nilai Evaluasi Intenal (AKIP)	Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh APIP				x
9	Persentase Ketaatan Penyampaian Pelaporan	Laporan Hasil Ketaatan Penyampaian Laporan oleh Setmenko				x
10	Persentase Realisasi Anggaran	Nilai Realisasi Anggaran				x
11	Persentase Temuan BPK	Laporan Hasil Temuan BPK				x

Jakarta, 18 Januari 2019

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

Purbaya Yudhi Sadewa